

TESIS
PENGARUH PENGELUARAN AGREGAT TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

THE EFFECT OF AGGREGATE EXPENDITURES POVERTY
LEVELS IN WEST SULAWESI PROVINCE

Disusun dan Diajukan Oleh:

AMMAR ASYRAF
A032202002



PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

TESIS
PENGARUH PENGELUARAN AGREGAT TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

THE EFFECT OF AGGREGATE EXPENDITURES POVERTY
LEVELS IN WEST SULAWESI PROVINCE

Disusun dan Diajukan Oleh:

AMMAR ASYRAF
A032202002



PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

TESIS

PENGARUH PENGELUARAN AGREGAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

AMMAR ASYRAF
A032202002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **30 Oktober 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA, CWM®
NIP. 19630516 199003 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hamrullah, SE., M.Si, CSE
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Tri Abdireviane, SE., MA, CWM®
NIP. 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si, CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Asyraf

NIM : A032202002

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: “**Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat**” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar 30 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Ammar Asyraf



PRAKATA

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena rahmat, hidayah, serta berkah-Nya yang melimpah memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat” dan diharapkan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Penulis juga mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dan membawa rahmat bagi semesta alam. Semoga penulis dapat mengikuti jejak perjuangan beliau dan menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah SWT serta bermanfaat bagi sesama.

Tajuk permasalahan dari penelitian ini berawal dari permasalahan kemiskinan disetiap negara terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah selalu mengupayakan bagaimana untuk menurunkan tingkat kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah. Peneliti tertarik untuk menyelidiki pengeluaran agregat dalam menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat , yang masih memiliki banyak daerah dengan tingkat Kemiskinan yang ekstrim. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini,peneliti menggunakan pendekatan pengeluaran agregat dengan mempertimbangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor sebagai variabel dependennya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.



Harapannya adalah bahwa tesis ini menjadi sebuah karya yang inspiratif dididik bagi para pembaca. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan, tesis

ini merupakan langkah awal penulis dalam perjalanan menuju pencapaian yang lebih baik. Diharapkan bahwa karya ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pembaca. Harapan ini tidak hanya dimiliki oleh penulis, tetapi juga oleh para pembaca yang akan membaca tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan Tajuk bantuan, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih khusus kepada Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA., CWM®. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Hamrullah S.E., M.Si. CSF sebagai Pembimbing Pendamping atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan tesis. Dukungan dan bantuan dari kedua pembimbing ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, yaitu Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E.,MA.CRP, Dr. Sabir, S.E.,M.Si.CWM®, Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si. CWM®, dan Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,MA.CWM® yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berharga dalam menyempurnakan tesis penulis.

Terima kasih kepada Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti program Magister. Terimakasih kepada Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,MA.CWM® selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan sekaligus Penasihat Akademik atas nasihat dan bimbingannya

apat menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada dosen di Program Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan



Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya. Terakhir, terima kasih kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan penuh kesabaran membantu penulis menyelesaikan urusan akademiknya.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin tahun 2020 dan 2021 serta teman-teman dan sahabat di Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat, bantuan moral, dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan studinya. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda Akhsan Hasry, Ibunda Ruhaniah. M dan saudara Muh. Anhar, Asy Ari, Akmal Firdaus serta Galuh Try Astuti yang telah memberikan bantuan tanpa henti, petunjuk, doa, saran, motivasi, serta keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-citanya.

Makassar, 15 Oktober 2023

Ammar Asyraf



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AMMAR ASYRAF. Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Anas Iswanto Anwar dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan data panel 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk Periode 2015-2022. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Analisis Jalur (Path Analysis) yang dibantu oleh aplikasi E-views 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga secara langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kemudian secara tidak langsung pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kemudian pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia. Investasi secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia. Net ekspor secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Net Ekspor, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

AMMAR ASYRAF. The Effect of Aggregate Expenditure on Poverty Level in West Sulawesi Province (supervised by Anas Iswanto Anwar and Hamrullah).

This study aims to analyse the effect of household consumption expenditure, government expenditure, investment and net exports on poverty through the human development index in West Sulawesi Province. This research uses panel data in 6 districts in West Sulawesi Province for the period 2015-2022. The data analysis method used in this research is the Path Analysis model which is assisted by the E-views 13 application. The results of this study indicate that household consumption expenditure directly has no effect on the poverty rate then indirectly household consumption expenditure has a positive effect on poverty through the human development index. Government expenditure directly has a positive effect on the poverty rate then government expenditure indirectly has a negative effect on the poverty rate through the human development index. Investment directly and indirectly has a negative effect on poverty through the human development index. Net exports indirectly have a positive effect on the poverty rate through the human development index.

Keywords: Household Consumption Expenditure, Government Expenditure, Investment, Net Export, Human Development Index, and Poverty Level.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Kemiskinan	14
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	17
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran.....	19
2.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	20
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1.6 Investasi.....	24
2.1.7 Net Ekspor	26
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	28
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan	28
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.....	28
.3 Hubungan Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan	29
.4 Hubungan Net Ekspor, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan	31



2.3 Penelitian Terdahulu	33
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	40
3.1 Kerangka Konseptual.....	40
3.2 Hipotesis.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN.....	45
4.1 Pendekatan Penelitian	45
4.2. Lokasi Penelitian	45
4.3. Jenis dan Sumber Data.....	45
4.4 Metode Analisis	46
4.5 Definisi Operasional Variabel.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN	51
5.1 Deskripsi Data	51
5.1.1 Persentase Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022	51
5.1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022	52
5.1.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022.....	54
5.1.4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	55
5.1.5 Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022.....	57
5.1.6 Perkembangan Net Ekspor di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022.....	58
5.2 Hasil Analisis	59
5.2.1 Hubungan Antar Variabel Secara Langsung	59
5.2.2 Hubungan Variabel secara Tidak Langsung.....	63
5.3 Pembahasan Hasil Analisis.....	66
5.3.1 Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia.....	66
5.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Melalui Indeks pembangunan Manusia.....	67
5.3.3 Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia	69
5.4 Pengaruh Net Ekspor Terhadap Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia	70
PENUTUP.....	72



6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	80



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022	51
Tabel 5.2 Indek Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022	53
Tabel 5.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022 (Juta Rupiah)	55
Tabel 5.4 Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022 (Juta Rupiah)	56
Tabel 5. 5 Investasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	4
Gambar 1. 2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan.....	6
Gambar 2. 1 Lingkaran Kemiskinan	15
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	43
Gambar 5. 1 Kerangka Hasil Penelitian	60



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan saat ini masih menjadi topik perbincangan yang serius disemua negara terutama untuk negara berkembang. Permasalahan kemiskinan saat ini masih menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia karena kemiskinan bukan hanya merupakan masalah pendapatan yang rendah, namun juga terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi kesehatan masyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan seseorang dengan taraf hidup yang rendah yang ditandai oleh keadaan yang serba kekurangan akan kebutuhan pokok (Pusparani, 2022).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penuntasan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program bidang lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (Demak et al., 2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak berujung pangkal yang bersifat kompleks. Penanganan kemiskinan harus memperhatikan profil penduduk miskin yang tepat sasaran. Masalah kemiskinan berdasarkan Ragnar Nurkse, dalam lingkaran kemiskinan memiliki arti sebagai sebuah permasalahan yang reaksi dan saling mempengaruhi yang menyebabkan suatu negara miskin



tetap dalam kondisi miskin, sehingga dapat dikatakan suatu negara miskin karena ia miskin. Lingkaran kemiskinan disebabkan karena di negara terbelakang memiliki total produktivitas yang sangat rendah yang diakibatkan karena kekurangan modal, ketidak sempurnaan pasar dan perekonomian yang terbelakang.

Dengan kemajuan ekonomi di Indonesia yang berkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga-lembaga yang membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan, hal ini menjadi perhatian utama bagi banyak negara dan organisasi (A. iswanto Anwar & Amiruddin, 2017)

Terkait akses terhadap layanan dasar, kurangnya tenaga dan fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi di Provinsi Sulawesi Barat. Pola pikir masyarakat yang masih mementingkan upacara dan pesta adat berbiaya besar, dengan mengorbankan kebutuhan pendidikan ataupun gizi turut mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Karakter masyarakat yang cenderung cepat puas dan kurang bijak dalam memanfaatkan bantuan dan dana desa menyebabkan produktivitas masyarakat tidak berkembang optimal, jika dikaitkan dengan rendahnya investasi masuk ke wilayah ini, keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai



akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Kondisi kemiskinan Indonesia sudah berhasil ditekan hingga angka 9,22% pada September 2019. Namun, adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara tak terkecuali Indonesia, membuat kemiskinan meningkat kembali pada Maret 2020. *Corona Virus* memang tidak hanya berdampak terhadap masalah kesehatan, tetapi juga melebar ke berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, termasuk meningkatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021).

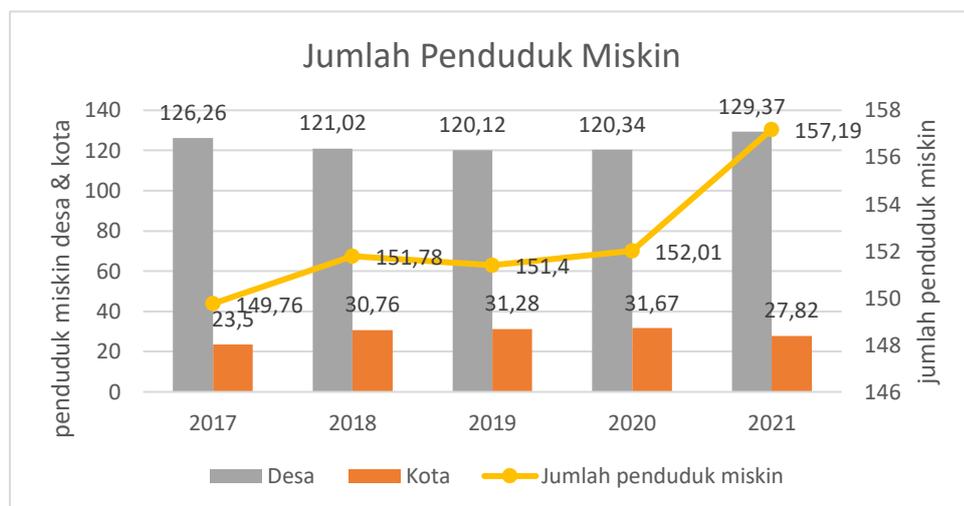
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di daerah manapun. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masih rendah, pengeluaran pemerintah yang belum tepat sasaran, tingkat investasi yang masih di bawah standar, net ekspor yang masih rendah, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Barat semakin melebar disebabkan karena tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat (Adisasmita, 2005).

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sasaran pembangunan



nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga kemiskinan menjadi salah satu akar permasalahan dari masalah rendahnya pembangunan di Indonesia (Misdawita & Sari, 2013).

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (Ribu Jiwa) 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan Gambar 1.1 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini tidak terlepas dari jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak tersedia di daerah perkotaan dibanding pedesaan. Data juga menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuatif dimana jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 157.19 ribu jiwa, sementara persentase



< miskin di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan dan 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 11,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum maksimal dalam

menurunkan tingkat kemiskinan, maka diperlukan program-program yang tepat dalam rangka mengatasi kesenjangan di daerah perdesaan dan perkotaan.

Di Provinsi Sulawesi Barat, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius dimana semakin meningkatnya penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,29%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10,14 %. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Sulawesi Barat antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, terbatasnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, rendahnya tingkat penghasilan dan kesempatan kerja, terbatasnya akses dan kualitas infrastruktur, serta konflik dan bencana alam. Mengatasi kemiskinan di Sulawesi Barat membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan fenomena kemiskinan seperti pengangguran. Selanjutnya ia mengerjakan pekerjaan yang meresahkan masyarakat (tindakan kriminal) seperti yang banyak terjadi yaitu pencurian, dan perampokan dimana mereka melakukan hal tersebut karena faktor lingkungan dan tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya sehingga pekerjaan tersebut untuk menutupi kebutuhannya.

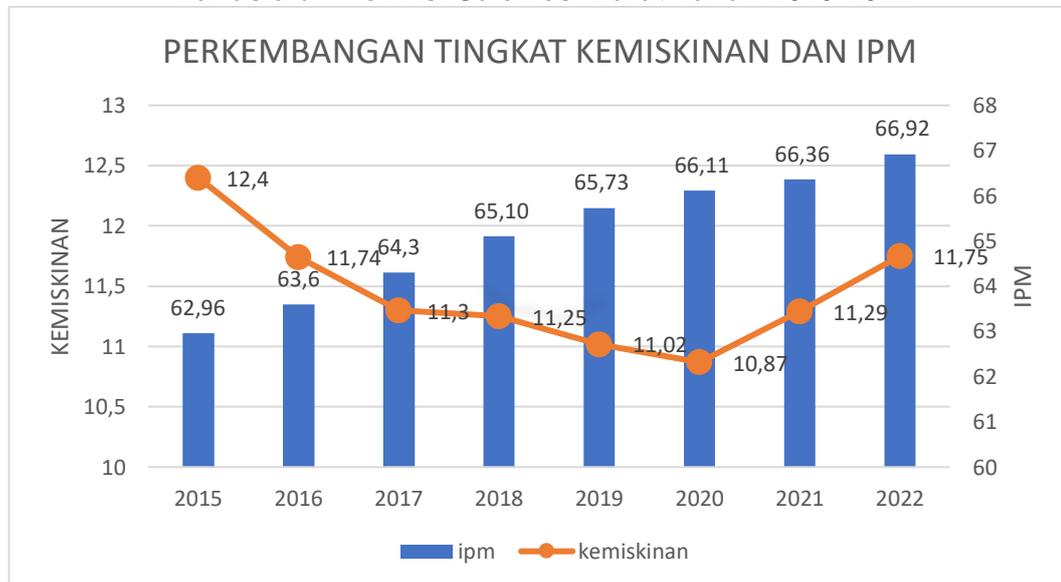
Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta pengentasan kemiskinan maka pemerintah menggunakan salah satu strategi

tan kualitas sumber daya manusia, dengan mengalokasikan dana dan ke bidang fasilitas publik yang diukur melalui Indeks Pembangunan



Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat indikator Pembangunan Indeks Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Gambar 1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Berdasarkan gambar 1.2 di atas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2015-2022 mengalami peningkatan, sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2020-2022 kembali mengalami peningkatan. Jika ditinjau lebih jauh, seharusnya pada saat indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan, karena meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia juga meningkat, dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan kemiskinan yang terjadi pada tahun 2020-2022 dikarenakan pandemic covid 19 dan Kondisi ini disebabkan oleh adanya penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,58%.



Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia atau indeks pembangunan manusia (Si'kang et al., 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang perlu mendapat perhatian terkait dengan capaian pembangunan manusianya yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan masih tertinggalnya IPM di Provinsi Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan IPM rata-rata di wilayah Sulawesi dan di Indonesia. Target IPM yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM di wilayah Sulawesi maupun nasional. Hal ini diperparah dengan capaian IPM yang tidak pernah mencapai target RPJMDnya sejak tahun 2017 sampai 2021 (Kanwil DJPB Prov. Sulbar, 2019).

Sulawesi Barat merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor ini seringkali terganggu oleh faktor seperti cuaca buruk, bencana alam, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini membuat masyarakat sulit untuk menghasilkan pendapatan yang stabil. Masih banyak masyarakat di Sulawesi Barat yang tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan, maka sangat diperlukan modal untuk dapat membangun sumber daya

tersebut agar tidak termasuk dalam lingkaran kemiskinan. Perbaikan adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi yang merupakan



kebijakan penting dalam strategi yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

Disisi lain pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar penting untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi, yang tidak lain bersifat investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Agussalim (2009) dalam bukunya Pendidikan dan Kesehatan merupakan cara terbaik untuk memperbaiki “Asef” kaum miskin. Dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas “Asef” tersebut, maka taraf hidup mereka akan lebih baik dalam jangka panjang. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.

Melalui investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang, dan pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan, dan perbaikan tingkat kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).

Tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH)



indikatornya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan cat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan (Faisal, 2013).

Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merujuk pada total pengeluaran yang dibuat oleh sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. PKRT meliputi pembelian makanan, minuman, sandang, papan, kesehatan, transportasi, pendidikan, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Pola konsumsi rumah tangga juga dapat mempengaruhi preferensi pendidikan seseorang. Rumah tangga yang lebih memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan pendidikan, seperti pembelian buku atau biaya les, mungkin lebih mendorong anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, rumah tangga yang lebih memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan sandang, mungkin lebih cenderung mengharapkan anak-anak mereka untuk bekerja setelah lulus sekolah.

Dalam hal ini, meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat membuka peluang pendidikan yang lebih besar bagi anak-anak di rumah tangga tersebut. Dengan memiliki lebih banyak sumber daya, rumah tangga dapat memberikan dukungan finansial yang lebih besar pada anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat membantu meningkatkan harapan lama sekolah dan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di masyarakat.

Menurut Mangkoesoebroto dalam Jean & Mongan (2019), pengeluaran rumah tangga mencerminkan kebijakan pemerintah, pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya



tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan terkait pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai berlaku sejak diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rostow dalam Prasetya *et al.* (2011), perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Kemudian tahap lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya.



et ekspor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui an ekspor dan impor, yang dapat mempengaruhi kinerja sektor ekonomi

dan produksi barang dan jasa di negara tersebut. Menurut teori Hecksher-Ohlin, perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada aktivitas ekspor dan impor. Ekspor dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih rendah, dan ini akan menguntungkan negara tersebut. Sedangkan impor dilakukan ketika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri, dan ini juga dapat saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Dalam hal ini, kegiatan ekspor dan impor merupakan faktor penting yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional (Pridayanti, 2013).

Net-ekspor akan mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dibandingkan jumlah impor karena hal tersebut juga mengindikasikan adanya kemampuan suatu daerah dalam persaingan pada perdagangan internasional lebih baik dan tidak hanya mengandalkan produk luar negeri atau luar daerah dalam kata lain melakukan kegiatan impor. Multiplier dalam ekspor dan impor secara berkesinambungan akan menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan Gross Domestic Product (GDP), pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dukungan finansial untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat memperluas akses pendidikan, membangun infrastruktur pendidikan, memperbaiki kualitas pengajaran dan pengembangan kurikulum, dan memberikan dana bantuan pendidikan dan kesehatan.

Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan sistematis, serta

: intervensi semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
 dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,



maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahun dan mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, namun hal tersebut belum efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan net ekspor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Agregat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.



4. Apakah net ekspor berpengaruh terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh net ekspor terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya (Mahmud et al., 2020).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan sebagai penduduk miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan



penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2 per hari masuk dalam kategori miskin (World Bank, 2006).

Teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagaimana yang dikatakan oleh Ragnar Nukse dalam Kuncoro “*a poor country is poor because it is poor*” yang artinya bahwa negara miskin disebabkan masyarakat miskin, modal yang terbatas dengan pasar yang tidak sempurna serta adanya keterbelakangan, menyebabkan produktifitas rendah. Produktifits rendah menyebabkan upah yang diterima rendah. Upah atau pendapatan rendah akan berakibat langsung terhadap konsumsi, tabungan maupun investasi. Rendahnya investasi berdampak kembali pada keadaan awal seperti keterbelakangan dan seterusnya, sehingga jika digambarkan akan membentuk suatu lingkaran (Athadena, 2021).

Gambar 2. 1 Lingkaran Kemiskinan



Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005) kemiskinan dapat dibagi dalam

untuk, yaitu:



1. Kemiskinan absolut yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Perkembangan terbaru mengenai teori ini disampaikan oleh Brady (2019) dalam jurnal *Annual Review of Sociology* Volume 45 No. 4. Dalam tulisannya yang berjudul *Theories of the Causes of Poverty*, ia mengemukakan dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa kemiskinan disebabkan oleh 3 komponen utama dari teori perilaku (*behavioral theories*), teori struktural (*structural theories*), dan teori politik (*political theories*). Teori perilaku berfokus pada perilaku individu yang didorong oleh insentif dan budaya, teori struktural menekankan pada konteks demografi dan pasar tenaga kerja yang menyebabkan perilaku dan kemiskinan, teori politik yang menyatakan bahwa kekuasaan dan institusi yang menyebabkan

an dan modernisasi hubungan antara perilaku dan kemiskinan.



Menurut Munkner dan Walter (2001) dalam Adawiyah (2020), kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung apakah kelompok yang miskin tinggal di perdesaan atau di perkotaan, dan apakah mereka hidup dalam struktur keluarga kecil, keluarga inti atau seorang diri. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu :

a). Apabila rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan. b). Apabila buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya. c). Apabila rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait



faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk

mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut *United Nations Development Programme* (1990), Indeks Pembangunan Manusia mengukur hasil pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen kualitas utama yang meliputi umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), berpengetahuan (*being knowledgeable*), dan memiliki standar hidup yang layak (*have a decent standard of living*). Indeks pembangunan manusia terdiri dari 4 kriteria, yakni indeks lebih dari 80 termasuk kategori sangat tinggi, indeks 70 hingga 79 termasuk kategori tinggi, indeks 60 hingga 69 termasuk kategori sedang, dan indeks kurang dari 60 termasuk kategori rendah (Runtuwuu, 2020).

Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan angka lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dengan metode baru yaitu dengan mengganti komponen sebelumnya yaitu angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia



nya sudah tidak efektif apabila masih menggunakan angka melek hidup (17).

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran sangat diperlukan terutama oleh pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi regional dan sebagai bahan kebijakan ekonomi pemerintah pusat untuk kebijakan masing-masing daerah. Kebijakan tersebut dirumuskan berdasarkan konsumsi akhir domestik, investasi, serta ekspor dan impor (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes siklus arus uang yang merujuk kepada ide peningkatan belanja (konsumsi) didalam sebuah perekonomian yang akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja serta pendapatan. Menurut (Mankiw, 2013) dalam Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang didalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain didalam perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, maka akan membantu meningkatkan pendapatan orang lain.

Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa: $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai permintaan

C menyatakan pengeluaran konsumsi Masyarakat, G menyatakan ran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan



membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

2.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Rumah Tangga adalah semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran rumah tangga salah satu indikator kesejahteraan individu dan sosial, tingkat pengeluaran rumah tangga menunjukkan tingkat perkembangan sistem ekonomi secara keseluruhan (Illahi et al., 2018).

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian maka jika pendapatan bertambah baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah (Priyono & Candra, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok individu yang tinggal bersama di suatu tempat tinggal, yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa dengan tujuan konsumsi. Kselompok individu ini biasanya terdiri dari anggota rumah tangga yang memiliki pendapatan, harta, dan kewajiban, dan mereka secara bersama-sama mengonsumsi barang dan jasa, terutama di bidang dan perumahan.



Menurut Sukirno (2000) pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi. Sedangkan Mankiw (2006), pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama meliputi, perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkrit, contohnya pendidikan.

Menurut Keynes dalam Sukirno (2013), yang menyatakan bahwa faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya kemudian akan meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para

nomi dan digolongkan ke dalam model pembangunan tentang anggaran pengeluaran yaitu:



1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, investasi pemerintah ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses dan persentase investasi pemerintah terhadap GDP akan semakin kecil. Pada tingkat perkembangan ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran aktivitas sosial, seperti halnya program hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya.
2. Peacock dan Wiseman (1988) mengemukakan teori yang didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Menurut teori ini perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran terhadap pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pendapatan yang semakin besar, begitu juga pengeluaran pemerintah apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan tersebut disebut efek pengalihan (*displacement effect*). Hipotesis yang dikemukakan



oleh Peacock dan Wiseman (1988) mendapat kritik dari Bird yang menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasinya terhadap GNP. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan persentase pengeluaran terhadap GNP perlahan-lahan akan menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Jadi, menurut Bird efek pengalihan hanya gejala dalam jangka pendek dan tidak terjadi dalam jangka panjang.

3. Soeparmoko (1987) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu: (1) pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya. Artinya, pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang atau jasa bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan. (2) pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, pengeluaran yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan (3) pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, objek wisata (4) pengeluaran yang tidak langsung produktif yang merupakan pemborosan misalnya, untuk pembiayaan perusahaan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan naik. (5) pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang, misalnya pengeluaran

< anak yatim piatu.



Selain itu, Teori Hukum Wagner dalam Irmayanti dan Bato (2017) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Wagner mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat

2.1.6 Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya seperti mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak, serta barang modal lainnya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut Hendarmin (2012) investasi atau penanaman modal merupakan menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemerintah digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat



atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah harapan untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari, hal ini berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh individu perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak membeli barang-barang atau jasa-jasa adalah harapan dikemudian hari nanti dapat memperoleh keuntungan dari penjualan atau penggunaan barang dan jasa untuk proses produksi. Harapan akan keuntungan inilah yang merupakan faktor utama dalam memutuskan apakah berinvestasi atau tidak. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.

Investasi yang lazimnya dalam proses pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan arti penting modal fisik, tetapi investasi tidak hanya dalam bentuk modal fisik namun juga ada investasi dalam pembentukan modal manusia. Menurut Jhingan dalam Noviansyah et al. (2017) pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Investasi modal fisik menjadi lebih produktif jika

daerah mempunyai modal manusia yang memadai. Daerah - daerah dengan semangat melaksanakan program pembangunan jalan raya, rumah sakit,



sekolah, perguruan tinggi dan sejumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Untuk menunjang kegiatan itu, dibutuhkan modal manusia seperti insinyur, teknisi, pengawas teknis, tenaga pengelola dan sebagainya. Jika berbagai macam modal manusia ini tidak memadai jumlahnya, modal fisik tidak akan dapat dimanfaatkan secara produktif.

2.1.7 Net Ekspor

Dalam perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor (exports) adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri untuk dijual ke luar negeri, sedangkan impor (imports) adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk dijual di dalam negeri (Mankiw, 2014).

Menurut Davies & Quinlivan, 2006 perdagangan tidak hanya menghasilkan peningkatan kuantitas barang, tetapi juga perluasan variasi barang yang dikonsumsi. Berbagai barang baru yang masuk ke negara atau daerah tersebut mencakup obat-obatan, kesehatan atau peralatan terkait pendidikan serta bimbingan medis, yang semuanya memperbaiki gizi, kesehatan dan umur panjang masyarakat. Sekalipun perdagangan tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi, diharapkan terjadi pemupukan lintas budaya yang ikut serta dengan perdagangan akan mendorong pertumbuhan langkah-langkah pembangunan manusia, hanya dengan memperluasnya perspektif masyarakat serta memperkenalkan produk baru kepada masyarakat

Net Ekspor adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka ekspor neto akan bernilai positif dan neraca perdagangan akan mengalami surplus. Semakin tinggi nilai net ekspor, positif pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika nilai lebih kecil dari nilai impor, maka net ekspor akan bernilai negatif dan neraca



perdagangan akan mengalami defisit. Semakin rendah nilai ekspor neto, semakin negatif pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori basis ekspor dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh), pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2005).

Sedangkan menurut Richardson bahwa ekspor tidak hanya mencakup barang/jasa yang dijual keluar daerah tetapi termasuk juga didalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan) atau lebih sering disebut sektor nonbasis. Pada intinya, kegiatan yang hasilnya dijual keluar daerah atau didatangkan dari luar daerah disebut kegiatan basis. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan Masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun asal uangnya dari daerah itu sendiri (Tarigan, 2005).



2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga menurunkan kemiskinan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menurunkan konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Teori Keynes dalam Sukirno (2013) yang menyatakan bahwa faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan sehingga kemampuan akan biaya pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Ketika belanja pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan, maka diharapkan pembangunan di daerah berjalan lancar.



ia yaitu belanja untuk peningkatan pelayanan publik, belanja bantuan belanja peningkatan infrastruktur, dan sebagainya. Sehingga dengan atnya belanja pemerintah daerah, maka proses pembangunan berjalan

lancar dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan hal ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu wilayah.

Menurut teori Wagner, pengeluaran pemerintah terus meningkat, karena disebabkan dengan meningkatnya beberapa fungsi pemerintah. Selain itu, pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat merupakan salah satu indikator pembangunan, sehingga pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat mengurangi kemiskinan di suatu wilayah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik seperti dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Investasi dalam hal pendidikan dan kesehatan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan maupun kesehatan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

2.2.3 Hubungan Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan

Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap



banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan keluar dari kemiskinan. Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat sehingga kemiskinan akan menurun. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni; (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar dinyatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, artinya bila suatu daerah investasinya rendah maka tingkat pendapatan masyarakat perkapita

umbuhannya juga rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi sebaliknya (Todaro, 2006). Investasi memberikan peran dalam



pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999). Kenaikan jumlah investasi akan menyebabkan sektor produktif bergerak, yang efeknya akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Daya Beli yang bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.4 Hubungan Net Ekspor, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Net ekspor memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena net ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari pada permintaan barang di dalam negeri, sehingga output juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan output ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila net ekspor mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri sehingga impor lebih besar dari pada ekspor dan hal ini akan mengakibatkan penurunan produksi barang dan jasa dan output akan mengalami penurunan (Putra et al., 2014). Ketika perekonomian berkembang dalam suatu wilayah, akan terdapat banyak pendapatan dibelanjakan, yang jika didistribusikan dengan baik diantara penduduk di wilayah tersebut maka akan mengurangi angka penduduk miskin, dengan kata lain secara teoritis pertumbuhan



memegang peranan penting dalam mengatasi penurunan angka an. Aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah merupakan

representatif dari pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang mengindikasikan kesejahteraan.

Argumen standar untuk hubungan positif antara perdagangan dan pembangunan manusia adalah bahwa lebih banyak perdagangan melahirkan standar hidup yang lebih besar yang pada gilirannya, melahirkan lebih banyak pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan sosial yang lebih baik. Perdagangan memiliki pengaruh terhadap pendapatan langsung, dan pengaruh pada pendapatan tidak langsung. Argumen yang lebih luas atau "globalis" adalah bahwa perdagangan berdampak pada langkah-langkah pembangunan manusia non-pendapatan baik secara tidak langsung melalui pendapatan maupun langsung melalui pembuahan lintas budaya dan peningkatan berbagai barang yang tersedia (Davies & Quinlivan, 2006)

Fungsi dari pengukuran tingkat pemerataan pendapatan di suatu daerah salah satunya adalah untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Repesentatif dari IPM berdampak pada tingkat penurunan jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Pembangunan manusia juga merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, dimana akan membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern



ak mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta
 iunan yang berkelanjutan (Nainggolan et al., 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Akhmad (2015) dalam penelitiannya diperoleh suatu model ekonometrika dampak pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota serta simulasi kebijakan yang menggambarkan perilaku dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan data panel (yaitu gabungan antara data *time series* tahun (2004- 2012) dan data *cross section* 10 kabupaten kota. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan system persamaan simultan. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Selanjutnya investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan pada 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM), investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Sementara jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, sementara belanja sosial berpengaruh positif namun tidak nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa, belanja sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah paling tidak banyak yang tidak tepat sasaran.

Nabeela Asghar (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *The Impact Of Government Spending On Poverty Reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008* menggunakan perkembangan ekonometrik terkini. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan hukum dan ketertiban secara signifikan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan sementara pengeluaran pemerintah untuk defisit anggaran dan layanan ekonomi dan masyarakat tampaknya bertanggung jawab atas kemiskinan di Pakistan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Studi ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Pakistan harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke bidang pendidikan dan kesehatan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Osundina *et al* (2014) dalam penelitiannya dengan judul *Disaggregated Government Spending On Infrastructure and Poverty Reduction in Nigeria*. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk gedung dan konstruksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Nigeria, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk transportasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing negatif dan positif tidak signifikan. Direkomendasikan agar pemerintah republik federal Nigeria harus meningkatkan pengeluaran untuk bangunan dan konstruksi karena penanggulangan kemiskinan meresponsnya dengan sangat baik.

Sofilda *et al.*, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dua arah antara IPM dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua.

ain yang relevan juga dianalisis dalam penelitian ini dan pengaruhnya kedua variabel utama tersebut. Formulasinya diuraikan sebagai berikut:



(i). dampak Tingkat Kemiskinan yang disesuaikan; pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap IPM; dan (ii). dampak IPM, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan juga dari Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan simultan pada model data panel *fixed effect* di 20 kabupaten dan kota di Provinsi Papua periode 2007 – 2011. Hasil persamaan IPM menunjukkan bahwa hanya fungsi ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan fungsi kesehatan tidak berdampak pada IPM. Sedangkan analisis persamaan Tingkat Kemiskinan menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan dan pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan yang baik dalam pengeluaran pemerintah dan juga tingginya tingkat kemiskinan serta pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.

Azwar (2016) dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah guran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah multan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi



Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Rai Negah (2019). Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengumpulan data melalui dokumen yang terdapat di BPS. Teknik analisis menggunakan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.



Christie N. J. Maramis (2013). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y), konsumsi (C), investasi (I), dan ekspor neto (X-M) di

Sulawesi Utara sebelum dan sesudah krisis finansial global tahun 2008 dengan melihat perbandingan pengujian penelitian yang sama terhadap Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini adalah metode uji beda dua rata-rata (Uji beda mean). Hasil penelitian menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi dan ekspor neto Sulawesi Utara dan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah krisis finansial global. Implikasi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan kebijakan seperti meningkatkan volume ekspor, untuk mengantisipasi dampak krisis global yang akan terjadi.

Novianti Evi (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap kemiskinan melalui pembangunan manusia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, gabungan dari data tahunan dan 21 kabupaten kota periode 2009- 2012. Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Penelitian ini menggunakan metode expose facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan menggunakan model analisis regresi berganda, output menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya = $0.004 < 0.05$ maka dapat dikatakan secara



pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan serta pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Hasanah *et al.* (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, serta menganalisis pengaruh usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Model yang terbaik setelah dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausmant* adalah *Fixed Effect*. Secara parsial hasil analisis variabel usia harapan hidup dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan usia harapan hidup, rata-rata sekolah sekolah dan pengeluaran perkapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Darmawan (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) pengaruh secara simultan tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia, dan (2) pengaruh secara parsial tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di wilayah Republik Indonesia, sumber data yaitu dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Bank Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dengan teknik analisis regresi linear berganda. Jumlah pengamatannya yaitu sebanyak 32 provinsi pada periode tahun 2015 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (2) tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap



kemiskinan di Indonesia, (3) konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, serta (4) tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

. A. I. Anwar et al., (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan yang dihadapkan pada permasalahan geografi terhadap kemiskinan. Kami menggunakan data panel tahun 2005 – 2013 dari 31 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan keuangan inklusif terhadap investasi dan pertumbuhan serta dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan artefak investasi yang lebih tinggi di Pulau Jawa dan Sumatera serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia

